

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Homoseksualitas menjadi topik yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Sebagai kelompok minoritas yang mengalami pengucilan dari beberapa kalangan masyarakat tertentu, kelompok ini berusaha memperjuangkan hak mereka untuk dapat diterima di dalam masyarakat seperti warga negara yang lain. Salah satunya seperti yang tertuang dalam film Milk garapan sutradara Gus Van Sant yang diproduksi oleh Focus Features bekerjasama dengan Axon Films. Film ini menampilkan sebuah kisah nyata komunitas homoseksual di San Francisco, Amerika Serikat pada awal tahun 70-an yang diwakili oleh tokoh Harvey Milk (Sean Penn).

Harvey Milk adalah seorang gay yang merasa bahwa pemerintah pada saat itu telah bertindak secara sewenang-wenang terhadap komunitas homoseksual tanpa mempedulikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal tersebut diperburuk oleh perlakuan masyarakat yang tidak adil dengan mengucilkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan yang diterima komunitas homoseksual dari aparat penegak hukum pada saat itu telah membangkitkan kesadaran bahwa hak atas persamaan dan keadilan harus diperjuangkan dan setiap manusia termasuk komunitas homoseksual memiliki hak yang sama untuk mendapat kebebasan, kebahagiaan, dan kehidupan yang layak. Harvey Milk termotivasi oleh keinginan akan adanya perubahan sosial

dalam penerimaan masyarakat terhadap kelompok homoseksual, sehingga hal tersebut sampai mengantarkannya menjadi gay terbuka yang pertama kali dipilih menjadi pejabat publik (*City Supervisor*) pada tahun 1978. Selama karirnya menjadi pejabat publik Milk juga secara aktif menentang kelompok konservatif yang mencoba untuk mengundat-undangkan referendum California di mana isi dari referendum tersebut melarang seorang homoseksual mengajar di sekolah-sekolah negara bagian California yang dikenal dengan istilah *Briggs Initiative*.

Disengaja atau tidak peluncuran perdana film Milk bertepatan dengan diterimanya proposisi 8 di California yang secara efektif melarang pernikahan gay di negara bagian tersebut. Secara tidak langsung terjadi sebuah ironi ketika film Milk yang sarat dengan upaya progresif memperjuangkan komunitas homoseksual dalam mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga negara lain, namun pada perkembangannya pada masa kini terjadi momentum yang menandai kemunduran pada hasil yang mereka dapatkan.

Kesuksesan film “Milk” yang mencuri perhatian penikmat film di seluruh dunia tidak lepas dari peran Sean Penn yang sangat mendramatisasi tokoh Harvey Milk. Penampilannya yang sangat menginspirasi tersebut menempatkannya sebagai aktor terbaik penghargaan Academy Award tahun 2009, Selain itu film Milk juga menjadi salah satu film yang meraih beberapa nominasi di berbagai kesempatan perhelatan festival film dunia, diantaranya adalah London Film Critics Circle 2009, Golden Globe Award 2009, Palm

Springs International Film Festival 2009, dan termasuk kategori film terbaik Academy Award tahun 2009.

Pergerakan komunitas homoseksual di Amerika mulai ditandai dengan meletusnya perlawanan Stonewall (1969) dimana pada saat itu terjadi perlawanan secara fisik komunitas homoseksual di dalam sebuah bar lesbian, gay, dan transeksual di kawasan Greenwich Village, New York bernama Stonewall Inn. Ratusan kaum homoseksual yang menjadi sasaran perlakuan represif polisi kota New York melakukan perlawanan dan mengakibatkan kekacauan dalam bar tersebut. Peristiwa Stonewall menjadi awal mula komunitas homoseksual untuk memperjuangkan keadilan dan persamaan hak mereka secara terbuka setelah sebelumnya komunitas homoseksual terus menyembunyikan identitas mereka karena tekanan dari masyarakat sekitar. Kehidupan kaum homoseksual di Amerika pada saat itu sangat dibatasi oleh berbagai macam bentuk prasangka buruk dalam masyarakat, kaum homoseksual dianalogikan seperti kaum Sodom dan Gomorah dalam kitab Injil yang disebut sebagai kaum yang terkutuk karena menyukai sesama jenis. Stigma ini mengakar kuat pada sebagian besar warga Amerika karena pengaruh ajaran Protestan yang dianut. Penggunaan istilah yang secara terminologi menghina kaum homoseksual pada waktu itu juga semakin memperjelas adanya pembedaan yang dilakukan sebagai upaya menjadikan homoseksual sebagai kaum yang terpinggirkan, sebagai contoh penggunaan istilah *Queer*, *Fairy*, atau *Faggot*. “Kata *Queer* berasal dari kata bahasa Jerman *quer* yang berarti bengkok, miring, atau salah” (Juliastuti dalam

www.kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm diakses tanggal 7 Agustus 2009). Awal mulanya kata ini tentu saja tidak digunakan untuk menyebut konotasi seksual tertentu, namun pada tahun 1920-an kata ini digunakan untuk menunjukkan kaum homoseksual laki-laki, sedangkan istilah *faggot* atau *fairy* merupakan kata yang mengacu pada panggilan yang paling buruk bagi laki-laki atau lebih mengarah pada pengertian kata "banci".

Queer menjadi istilah yang populer di antara kaum homoseksual laki-laki hingga secara perlahan mulai digantikan dengan istilah "gay" yang berarti orang yang meriah (Anderson dalam Oetomo, 2003: x). Proses penggantian ini telah dimulai sejak tahun 1930-an dan diintensifkan sampai sekarang sebagai upaya untuk memberikan pencitraan yang lebih baik pada kaum Homoseksual.

Secara umum 'gay' merefleksikan sentimen dari orang-orang yang lebih muda untuk mengkritik orang-orang tua atas penggunaan terus menerus kata queer yang cenderung merendahkan karena lebih menekankan perbedaan dari laki-laki yang 'straight' atau normal dengan mengasosiasikan queer sebagai orang yang mempunyai penyimpangan seksual (Juliastuti dalam www.kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm diakses 7 Agustus 2009).

Penggunaan kata gay sampai sekarang dirasa lebih mewakili sekaligus memberi proses akulturasi sebuah hubungan berdasar identitas sosial yang lebih diterima oleh masyarakat luas. Walaupun penerimaan masyarakat yang masih diskriminatif dan tidak selalu positif bagi kaum gay dan lesbian tapi setidaknya kaum gay dan lesbian berhasil memposisikan identitas mereka dari kaum yang "terkutuk" menjadi yang "ditindas". Kaum homoseksual yang selama ini terpasung dalam satu lingkungan yang tertutup menjadi lebih

terbuka untuk memperjuangkan apa yang menjadi pilihan hidupnya (*coming out of the closet*).

Perbuatan homoseksual (*homosexual acts*) atau perilaku homoseksual (*homoseksual behaviour*) menurut A.A. Sukadana (dalam Oetomo, 2003: 25) mengacu pada kegiatan atau perilaku seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama. lebih jauh lagi homoseksualitas dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada orang-orang dengan jenis kelamin yang sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama (*Ibid.*, hlm. 6). Film Milk juga mengkonstruksikan kembali bagaimana politik identitas komunitas homoseksual di wilayah Castro, San Francisco, Amerika serta perjuangan Harvey Milk dalam memperjuangkan kaum minoritas untuk memperoleh persamaan hak mereka selama 8 tahun terakhir dari hidupnya sebelum dibunuh oleh Dan White (Josh Brolin) yang tidak lain adalah rekan Harvey Milk di *Supervisor Board*, San Francisco.

“Politik identitas sendiri adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan” (Lukmantoro dalam www.wawasandigital.com/index.php diakses 10 Agustus 2009). Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan, hal ini dikarenakan identitas juga menyangkut segala sesuatu yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya. “Politik identitas mengacu pada

mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik” (Setyaningrum, 2005:18).

Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Komunitas homoseksual menjadi salah satu pihak yang menjadi korban ketidakadilan tersebut karena homoseksual bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang memandang bahwa produksi tenaga kerja dan struktur-struktur ideologis lewat keluarga “normal” sangatlah penting. Orang-orang yang tidak menyesuaikan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan “normal” dianggap melanggar ketertiban sosial. Seksualitas yang dianggap baik, normal, dan natural secara ideal adalah yang heteroseksual, monogami, reproduktif dan non-komersial. Ditambah lagi, ia juga harus berpasangan, relasional, dari satu generasi yang sama dan terjadi dalam rumah. Seks yang buruk meliputi homoseksual, di luar perkawinan atau komersial (Alimi, 2005: 9). Prasangka inilah yang tercermin pula dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sehingga kaum homoseksual dipandang tidak senonoh dan dapat di PHK, dipukul, bahkan dibunuh akibat pilihan hidupnya.

Kondisi mengenai kehidupan homoseksual diatas yang coba kembali disajikan dalam sebuah karya layar lebar berjudul Milk. Film Milk menggambarkan sebuah fenomena yang menarik tentang pesan-pesan tertentu yang boleh jadi berbeda dengan makna aslinya. Apa yang direpresentasikan dalam film tersebut mencitrakan kondisi yang dialami oleh komunitas

homoseksual di Amerika. Komunitas homoseksual ingin memposisikan kembali keberadaan mereka sebagai bagian yang setara dengan masyarakat pada umumnya melalui politik identitas. Masalah tersebut yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga dapat dipahami bagaimana politik identitas komunitas homoseksual dalam film Milk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut “bagaimana politik identitas komunitas homoseksual dalam film Milk?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan :

1. Mengetahui bagaimana politik identitas komunitas homoseksual dalam film Milk.
2. Mengkaji realitas kultural komunitas homoseksual melalui tanda-tanda dan makna yang ditampilkan dalam film Milk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penelitian karya-karya ilmiah selanjutnya, terutama pada konstruksi politik identitas yang ditampilkan dalam film.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian sosial khususnya yang mengangkat tema tentang kelompok minoritas seperti Homoseksual serta kajian studi kontemporer yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Konstruksi Realitas Dalam Media

Media massa adalah tempat yang dapat mengkonstruksikan realitas tertentu dengan menampilkannya kembali dalam bentuk spesifik melalui pemahaman serta pengertian secara beragam dan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan pada sebuah kondisi yang akan diciptakannya. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan Berger dan Luckmann (dalam Sobur, 2004: 91) yang memahami bahwa “Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial, dalam pandangan mereka tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan”.

Media massa sendiri menurut Dennis McQuail (dalam Junaedi, 2007: 14) dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada

khalayak luas dalam waktu yang singkat. Lebih jauh lagi media menjadi penghubung yang membuat semua individu-individu seperti berada dalam sebuah lingkungan yang terintegrasi (*Global Village*) dengan kata lain media dapat dipahami sebagai saluran yang seolah-olah dapat menghilangkan jarak antara khalayak dengan realitas yang terjadi diseluruh dunia.

Melalui media massa, seseorang maupun kelompok tertentu dapat memposisikan dirinya untuk mencapai tujuan yang hendak diraih, sehingga dalam kenyataannya media bukanlah sebuah saluran yang netral dimana setiap kelompok dapat menampilkan kekuatan dan pengaruhnya dalam masyarakat secara apa adanya. Sekali lagi media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pendapat Bennet (dalam Eriyanto, 2005:36) bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media menyajikan sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran, dan manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhinya karena dalam konstruksi terhadap realitas yang dibentuk terdapat pengaruh kesadaran mental masing-masing individu didalamnya dan juga ikut serta pengalaman-pengalaman sosial, pengetahuan, dan ideologi.

Media membentuk kesadaran palsu bagi khalayak karena realitas yang ditampilkan telah dikonstruksikan sedemikian rupa menjadi sebuah hal yang seolah-olah adalah kebenaran yang mutlak, sehingga terdapat pemikiran bahwa realitas sosial yang terbentuk adalah realitas maya atau semu yang pada akhirnya kekuatan konstruksi sosial media massa mampu melumpuhkan daya kritis khalayak. Sementara itu menurut Hall (*ibid.*, hlm: 34) realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu set fakta, tetapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu, sehingga terdapat aktualisasi realitas yang secara berkesinambungan didefinisikan melalui praktik bahasa, termasuk bagaimana konstruksi realitas yang ada dalam media massa dipahami.

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai peragkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya (Sobur, 2006: 88).

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mengkonstruksi realitas. Semua didasari oleh beberapa unsur didalam lingkungan. Untuk dapat memahami suatu realitas yang diberikan media, setiap manusia dapat menggunakan sesuatu dalam pikirannya yang oleh Alfred Schutz (dalam Noviani, 2002: 49) dinamakan sebagai *stock of knowledge*. Cadangan pengalaman yang diperoleh individu sebagai sumber interpretasi terhadap realitas adalah hasil dari sebuah proses pendekatan baik secara sosial maupun kultural.

Media massa memiliki potensi untuk menyebarkan ideologi dominan serta menampilkan ideologi alternatif yang berlawanan dengan ideologi dominan, dalam hal ini budaya massa dianggap sebagai area pertarungan (*site of struggle*) antara berbagai kelas, baik itu kelas dominan maupun kelas subordinat. Terdapat berbagai pertentangan ideologis yang terjadi dalam media massa, disisi lain media digunakan oleh sekelompok orang yang berkuasa untuk memperkuat legitimasinya atas kelompok yang lain, namun media juga memberikan sebuah jalan yang digunakan oleh kelompok yang didominasi untuk memperlihatkan eksistensinya dengan realitas yang mereka bentuk sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini publik. Hal inilah yang menjadi objek gagasan Antonio Gramsci yang secara khusus membahas bagaimana hubungan ideologis tersebut berlangsung sekaligus menyoroti penerimaan antar kelompok yang terjadi dalam sebuah lingkup yang majemuk seperti yang diungkapkan Sobur (*ibid.*, hlm: 30) sebagai berikut :

Media merupakan arena pergulatan antara ideologi yang saling berkompetisi. Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan. Di satu sisi media bisa dijadikan sebagai sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga dapat menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan.

Ideologi sendiri diklasifikasikan oleh Raymond Williams (dalam Fiske, 1990 : 165) menjadi tiga ranah. Pertama, adalah sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Kedua, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat- ide palsu atau kesadaran palsu – yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Ketiga, proses umum

produksi makna dan ide. Tataran yang pertama ideologi dipahami sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan secara koheren. Ideologi bukan hanya sesuatu yang terlihat sebagai sikap seseorang, namun lebih dari itu ideologi dibentuk oleh masyarakat dimana ia hidup, baik dalam posisi sosialnya, pembagian kerja dan lain sebagainya. Secara umum ideologi mengacu pada sebuah 'ide' yang dipegang bersama baik oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan kesehariannya sehingga ideologi itu sendiri "Mengindikasikan bahwa kelompok yang memegang beragam ideologi memersepsi dan memahami dunia dengan cara tertentu yang konsisten (Thwaites, dkk., 2009: 233). Sementara itu Ideologi dalam ranah yang kedua merupakan salah satu hal dimana ideologi ditempatkan sebagai sebuah perangkat kategori yang dibuat untuk membentuk kesadaran semu oleh kelompok yang berkuasa atau dominan dalam usahanya untuk mendominasi kelompok marjinal yang disebarkan pada masyarakat. Sejatinya menurut John B. Thompson (dalam Lull, 1995: 6) "Ideologi hanya dapat dipahami dengan tepat sebagai 'ideology dominan' dimana bentuk-bentuk simbolis dipakai oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membangun dan melestarikan hubungan dominasi". Ideologi dalam hal ini membentuk kerangka pikir yang membuat kelompok yang didominasi melihat segala sesuatu bersifat natural atau alamiah sehingga diketahui bahwa Ideologi di sini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak nyata, wajar, dan alamiah, dan tanpa sadar kita menerima sebagai

kebenaran (Eriyanto, 2001: 88). Ranah yang ketiga menggambarkan ideologi sebagai produksi makna. Ideologi memanifestasikan perangkat ide-ide dan makna yang terdapat pada peristiwa tertentu, dalam ranah ketiga ini juga dijadikan sebagai sumber dari pemaknaan di mana ideologi diproduksi dan bersirkulasi dalam kehidupan sehari-hari dengan proses sistem pertandaannya.

Kehadiran ideologi yang dibentuk oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi melahirkan sebuah pandangan yang menekankan tentang bagaimana keberlangsungan penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan dalam suatu proses damai yang dikenal dengan hegemoni.

Hegemoni dipopulerkan oleh ahli filsafat politik terkemuka Italia Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi tidak hanya dilakukan dengan kekerasan (*violence*) akan tetapi dapat juga dilakukan dengan pengaruh ideologis (*ideology*) karena ideologi sendiri dapat secara efektif menghubungkan seseorang untuk melakukan perubahan secara logis dan bernalar sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dominasi dalam kekuatan penguasa menggunakan daya paksa (koersi) untuk membuat orang secara massal mengikuti dan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan hegemoni seperti pendapat Eriyanto meliputi "Perluasan dan pelestarian 'kepatuhan aktif' (secara sukarela) dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan

intelektual, moral, dan politik” (*ibid.*, hlm: 103). Secara khusus hegemoni tidak dipaksakan kepada individu, namun ditawarkan oleh penguasa sebagai otoritas dominan yang diperoleh melalui persetujuan kelompok dan formasi bawahan. ”Inilah sebabnya mengapa hegemoni adalah semacam bentuk kepemimpinan kekuasaan dan kultural yang halus dan stabil” (Thwaites, dkk., 2009: 246).

Tentu saja dalam proses hegemoni tidak lepas dari campur tangan media yang secara tidak sengaja telah menjadi alat penyebar nilai-nilai maupun wacana yang dipandang dominan kepada khalayak sehingga menjadi sebuah konsensus bersama. Wacana dominan seolah-olah ditampilkan media secara apa adanya dan dengan seksama dihayati sebagai sebuah kewajaran, oleh karenanya khalayak tentu saja tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh realitas yang dikonstruksi media tersebut. Hegemoni dan ideologi telah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain, pada akhirnya keduanya berartikulasi dalam kelompok dominan maupun subordinat seperti pemahaman Gramsci (dalam Strinati, 2007 : 188-189) bahwa :

Hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis dimana kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya tapi bukan secara eksklusif kelas penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan 'persetujuan spontan' kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi.

Media massa memiliki kuasa yang luar biasa dalam mengkonstruksi realitas tertentu. Terdapat kompleksitas yang menjadikan media massa menjadi objek yang sangat unik dalam proses komunikasi massa. Media telah menjadi perpanjangan pemikiran manusia di mana didalamnya ideologi juga memiliki peran untuk ”Mengorientasikan orang-orang dalam pelbagai konteks sosial untuk menerima nilai tertentu tentang dunia sebagai natural, nyata, jelas tanpa perlu dibuktikan, atau tak terelakkan (Thwaites dkk, 2009: 261).

2. Film Sebagai Sebuah Sistem Representasi

Film pada awalnya dipahami sebagai serangkaian gambar yang bergerak yang dirangkai sedemikian rupa menggunakan alat tertentu sehingga membentuk sebuah garis cerita yang ditampilkan kepada penonton. Film menjadi media *audio visual* yang memiliki efektifitas dalam penyampaian pesan. “Alat-alat audiovisual adalah alat-alat yang ‘*audible*’ (dapat didengar) dan ‘*visible*’ (dapat dilihat). Alat audiovisual ini gunanya untuk membuat cara berkomunikasi lebih efektif” (Suleiman dalam Kuswandi. 1996: 16). Sifatnya yang menonjolkan bentuk gambar dan suara menjadikan film lebih menarik dinikmati daripada media cetak yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu sejak pertama kali media film ditemukan pada akhir abad ke-19, film menjadi media baru yang digunakan untuk mempengaruhi opini khalayak secara efektif.

Film adalah bagian dari berkembangnya media komunikasi massa seperti halnya surat kabar, televisi dan radio. Sebagai media komunikasi massa film diperkuat dengan ciri-cirinya sebagai berikut :

Sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan suatu organisasi formal, dan “sang pengirim”-nya seringkali merupakan komunikator profesional. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam, serta dapat diperkirakan. Disamping itu, pesan tersebut seringkali “diproses”. Distandarisasi, dan selalu diperbanyak. Pesan itu juga merupakan suatu produk dan komoditi yang mempunyai nilai tukar, serta acuan simbolik yang mengandung nilai “kegunaan”. Hubungan antara pengirim dan penerima bersifat satu-arah dan jarang sekali bersifat interaktif. Hubungan tersebut juga bersifat impersonal, bahkan mungkin sekali seringkali bersifat non-moral dan kalkulatif, dalam pengertian bahwa sang pengirim biasanya tidak bertanggungjawab atas konsekuensi yang terjadi pada para individu dan pesan yang dijualbelikan dengan uang atau ditukar dengan perhatian tertentu. (McQuail,1996: 33-34).

Setidaknya sebagai media komunikasi film telah memenuhi beberapa prinsip utama seperti pesan, saluran, isi, serta efek yang ditimbulkan. Film memiliki komunikator dan komunikan sehingga pada dasarnya film menyajikan sebuah pesan dan kode yang telah disusun oleh komunikator serta diterima, diuraikan dan diinterpretasikan oleh komunikan. Film tidak lagi dimaknai sekedar karya seni (*film of art*), tetapi lebih sebagai “praktek sosial” serta komunikasi massa. Terjadinya pergeseran ini paling tidak, telah mengurangi bias normatif dari teoritis film yang cenderung membuat idealisasi dan karena itu mulai meletakkan film secara objektif (Irawanto, 1999: 27).

Sebagai salah satu media massa yang kehadirannya sangat penting bagi proses komunikasi, film juga merupakan bagian dari kompleksitas representasi. Representasi sendiri menjadi penting untuk dibicarakan

ketika menunjuk pada dua hal. Pertama adalah apakah seseorang, satu kelompok maupun gagasan tersebut telah ditampilkan sebagaimana mestinya. Penggambaran yang ditampilkan bisa saja adalah penggambaran buruk dan cenderung memarjinalkan seseorang maupun kelompok tertentu. Upaya ini tidak lepas dari pencitraan yang ingin ditampilkan serta kepentingan yang ingin diperoleh. Kedua adalah bagaimana representasi tersebut ditampilkan di media. Kata, kalimat, gambar adegan, dialog dan aksentuasi yang ditampilkan kepada khalayak merupakan salah satu unsur dari sebuah representasi yang menunjukkan suatu hal yang harus ditafsirkan. Representasi menurut Hall (1997: 17) juga memiliki cara pandang yang dapat dipetakan menjadi dua bagian utama, yakni *mental representations* dan bahasa.

Mental representations bersifat subyektif, individual; masing-masing orang memiliki perbedaan dalam mengorganisasikan dan mengklasifikasikan konsep-konsep sekaligus menetapkan hubungan diantara semua itu. Sedangkan bahasa menjadi bagian sistem representasi karena pertukaran makna tidak mungkin terjadi ketika tidak ada akses terhadap bahasa bersama (*ibid.*).

Penjelasan diatas menandai sebuah proses representasi yang sejalan dengan proses interpretasi secara personal dalam memahami produksi makna melalui bahasa secara konstruktif.

Hall (dalam Burton, 2007: 177) juga menjabarkan mengenai tiga pandangan kritis terhadap representasi. Ketiga pandangan ini melihat bagaimana posisi *viewer* dan *creator* dalam mengkritisi makna konotasi yang terdapat di balik sebuah representasi yang mencakup :

1. *Reflective*, yakni pandangan tentang, makna tentang. Di sini representasi berfungsi sebagai cara untuk memandang budaya dan realitas sosial.
2. *Intentional*, merupakan sudut pandang dari *creator* yakni makna yang di harapkan dan di kandung dalam representasi.
3. *Constructionist*, adalah pandangan pembaca melalui teks yang di buat. Hal ini di lihat dari penggunaan bahasa atau kode-kode lisan dan visual, kode teknis, kode pakaian dan sebagainya, yang oleh televisi dihadirkan kepada khalayak secara audio visual.

Representasi tidak terlepas dari kepentingan. Kepentingan tersebut diwujudkan melalui makna yang muncul dari penggunaan bahasa maupun tanda-tanda yang ditampilkan sebagai upaya menciptakan pengaruh secara ideologis bagi khalayak.

Film menjadi media yang merepresentasikan realitas tertentu dengan menghadirkan kembali peristiwa yang ditandakan (encode) sebagai suatu objek melalui penggambaran yang dibentuk oleh struktur teknis dan teks dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Hal ini senada dengan pendapat Turner (dalam Irawanto, 1999: 14) mengenai perspektif film sebagai representasi realitas bahwa :

Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat...berbeda dengan film sekedar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya.

Realitas yang ditampilkan dalam film mengacu pada susunan tanda yang ditampilkan secara simultan. Tanda tersebut disusun melalui proses pembentukan sebuah makna secara konstruktif sebagai salah satu unsur penyampain pesan secara lengkap baik dalam bentuk tanda yang verbal

maupun non verbal. Tanda verbal diwakili oleh bentuk struktur bahasa dalam yang dipakai dalam film tersebut, sedangkan tanda nonverbal merujuk pada *gesture*, gerak, maupun simbol yang digunakan untuk memperjelas pesan serta memperoleh reaksi penonton yang diinginkan.

Film tidak lepas dalam fungsinya sebagai kritik sosial. Ada beberapa film yang diproduksi dalam kaitannya sebagai sarana yang kuat untuk mengapresiasi kondisi sosial budaya masyarakat baik dalam feature maupun fiksi. Selain itu dalam kondisi yang berbeda film menjadi sarana yang sangat penting karena banyak pengamat mendiskusikan mengenai hubungan muatan film dengan masyarakat yang menghasilkannya.

Uni Soviet pernah menggunakan media film sebagai media propaganda yang sangat efektif dengan pendekatan formalisme mereka. Italia pernah mengenal neo-realisme yang mendekati problem-problem struktural kemiskinan pasca Perang Dunia Pertama. Perancis misalnya pernah mengenal realisme puitis yang merespon kegelisahan pasca Perang Dunia Kedua. Amerika tahun 1950-an dipenuhi oleh kisah fiksi ilmiah yang menggadang ketakutan terhadap perang bintang akibat peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet. (Sasono dalam www.kompas.com.htm diakses 24 Oktober 2009).

Contoh diatas menjadi sebuah gambaran bahwa pembuat film terus mencari muatan film dan cara tutur yang mampu menangkap pesan masyarakatnya. Hal ini tentulah tidak mudah karena membutuhkan proses yang dilatarbelakangi oleh tradisi yang panjang baik melalui berkesenian secara umum maupun bertutur dalam media film.

Film dapat menjadi media penghubung antara masa lalu, masa kini dengan masa depan dalam sebuah *frame* yang dicitrakan. Seperti sebuah keinginan untuk mendokumentasikan sesuatu hal, film tidak lepas dari obsesi dunia akan suatu memori, bahwa film-film yang dibuat berdasarkan latar belakang kejadian dimasa lalu yang sangat berarti bagi posisi identitas dan pembentukan peradaban yang terjadi dimasa depan. Film dapat menjadi karya monumental yang menandai peristiwa dalam kurun waktu tertentu, serta memuat berbagai kebudayaan masyarakat yang sedang atau telah muncul sebagai wujud karakteristik keadaan yang terjadi, namun selain itu bisa juga film ditempatkan sebagai pencitraan yang bersifat prediktif berdasarkan gejala yang sudah terlihat sebelumnya.

3. Identitas dan Politik Identitas

Masyarakat secara luas terdiri dari berbagai latar belakang yang kompleks berdasarkan pada etnis, ras, gender, agama, sosial dan budaya bahkan pada orientasi seksualnya. Perbedaan latar belakang inilah yang membentuk sebuah identitas, dalam pengertian lain menurut Lan (dalam Kinasih, 2005: 4) "Identitas adalah tentang *belonging*, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan tentang apa yang membedakan kamu dengan lainnya. identitas dipahami sebagai sesuatu yang paling mendasar, identitas memberi kamu rasa tentang lokasi pribadi, inti yang stabil bagi individualitasmu". Pendapat tersebut yang turut mendasari

bahwa "Kenyamanan secara psikis yang terbentuk seiring dengan Identitas hanya bisa ditandai dalam perbedaan sebagai suatu bentuk representasi dalam sistem simbolik maupun sosial, untuk melihat diri sendiri tidak seperti yang lain" (Woodward dalam Ajidarma, 2006: 1), oleh karena itu identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai "perbedaan" (*difference*) (Setyaningrum, 2005: 19).

Identitas berkembang atau dimobilisasi bagi kepentingan tertentu yang memicu adanya kesempatan pada kemunculan identitas sosial politik yang baru. Perkembangan ini menjadi sebuah indikasi di mana identitas menjadi suatu hal yang penting disaat keragaman dalam masyarakat menjadi terintegrasi tanpa adanya sekat-sekat yang membatasi kebebasan berekspresi masing-masing individu. Identitas adalah dasar bagi setiap orang maupun kelompok untuk menyuarakan keberadaannya sehingga dapat menempatkan posisi mereka secara seimbang dalam proses interaksi sosial. Hal ini tidak lain karena "Identitas sosial atau budaya seseorang, misalnya yang didasari oleh sistem kelas (bawah, menengah, atas), seksualitas (heteroseksual, homoseksual), agama (Islam, Kristen, dan lain-lain), merupakan sumber bagi identitas politik dan karenanya signifikan bagi mobilisasi politik identitas" (*ibid.*).

Pengorganisasian identitas dalam kehidupan sosial maupun politik dipengaruhi oleh posisi identitas yang secara fundamental sangat penting dalam masyarakat global, karena pada dasarnya identitas dibentuk dalam rangka mendapatkan pengakuan (*recognition*) serta persamaan sosial (*social equality*). Setiap individu maupun kelompok menginginkan identitas yang positif maka dari itu usaha pencapaian identitas positif tersebut diraih melalui mobilitas sosial serta perubahan sosial yang dilakukan. Pengertian mobilitas sosial sendiri dipahami sebagai perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi (Susetyo, 2002: 6). Mobilitas sosial mungkin saja terjadi apabila peluang untuk berpindah menjadi terbuka, namun apabila peluang tersebut tidak ada maka kelompok bawah tersebut akan berusaha untuk meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok dengan memperbaiki pencitraan agar tampak tidak jelek.

Identitas selalu mengalami keberlanjutan dari waktu ke waktu, selain itu identitas juga mengalami transformasi dan berubah secara terus-menerus seperti gagasan berikut ini :

Identitas adalah sebuah proses yang tidak terberi (*given*), dan tidak statis. Pada suatu ketika seseorang bisa saja menggunakan suatu identitas tertentu, tetapi disaat yang lain ia akan menunjukkan identitas yang berbeda pula. Identitas adalah sesuatu yang hibrid, ia sangat licin dan rentan manipulasi. Identitas sangatlah pelik dan tidak konsisten, ketika lingkungan sosial politik mengalami perubahan, maka identitas turut pula mengalami perubahan. Akibat proses politisasi yang sedemikian rupa, acapkali batas-batas asli dan identitas yang dipolitisasi menjadi tidak jelas. (Kinasih, 2005: 5).

Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dikemukakan Hall (dalam Ajidarma, 2006: 1) bahwa “Identitas adalah suatu produksi, bukan esensi yang tetap dan menetap, dengan begitu identitas selalu berproses, selalu membentuk, di dalam—bukan di luar—representasi. Ini juga berarti otoritas dan keaslian identitas dalam konsep “identitas kultural” misalnya, berada dalam masalah”.

Terdapat sebuah proses “menjadi” dalam identitas, dan tentu saja ditambah dengan perubahan secara dinamis. Identitas membentuk kesadaran yang dibangun dari masa lalu melalui berbagai memori dan peristiwa yang diaktualisasikan menjadi sebuah sejarah yang ada. Identitas yang dikategorikan dalam identitas sosial dan politik dikonstruksikan dalam objek individu maupun kelompok menjadi sebuah ruang gerak bagi apa yang dinamakan politik identitas.

Politik identitas sendiri adalah salah satu kajian keilmuan yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Politik identitas erat kaitannya dengan pengorganisasian secara sistemik antara identitas sosial dan identitas politik.

Identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan—*citizenship*). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005:18).

Karakteristik politik identitas mengacu pada adanya konstruksi “perbedaan”, karena peran identitas yang membuat seseorang atau kelompok menjadi berbeda dengan yang lain, oleh karenanya politik identitas sering juga disebut dengan politik perbedaan atau juga politik diferensi. Politik identitas didefinisikan sebagai konsep dan gerakan politik yang fokusnya adalah perbedaan sebagai kategori politiknya yang utama. Ide perbedaan ini menurut Abdillah menjanjikan bentuk-bentuk kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*) (Abdillah, 2002: 137). Selain itu politik identitas erat kaitannya dengan gagasan atau ide tentang terjadinya penindasan terhadap kelompok-kelompok sosial berkaitan dengan identitas mereka baik berdasarkan ras, etnis, gender, seksualitas, kelas, dan sebagainya. Politik identitas diaktualisasikan sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu (Hayes dalam Lukmantoro, www.wawasandigital.com/index.php diakses 10 Agustus 2009). Gerakan politik identitas berusaha untuk menyuarakan kembali pada siapapun yang selama ini dibatasi kebebasannya. Penindasan yang selama ini terjadi harus diakhiri serta mengupayakan deskripsi ulang, atau transformasi ulang terhadap kategori identitas yang selama ini telah terstigmatisasi.

Konstruksi sosial mengakibatkan individu-individu diletakkan dalam suatu lokasi (realitas sosial) tertentu dalam suatu upaya politis menyangkut identitas, oleh karena itu politik identitas dapat dipahami dengan dasar pada tempat atau posisi identitas-identitas individu tersebut diletakkan dan secara jelas sifat ini sekaligus menjelaskan bahwa *identity politics* disebut juga sebagai *the politics of location*. Area politik identitas bukanlah sesuatu wilayah yang netral. Proses legitimasi yang terjadi didalamnya mengakibatkan sebuah tarik-menarik antara berbagai kepentingan yang bermain didalamnya, seperti pendapat Benhabib (dalam Rahayu, 2006: 4) bahwa “Konstruksi sosial dalam identitas merupakan proses pertarungan politik, sosial, dan budaya untuk saling bersaing menghegemoni diantara kelompok-kelompok sosial, masing-masing berusaha mendominasi atau membebaskan definisi-definisi identitas tertentu terhadap kelompok sosial lain”. Politik identitas adalah sebuah usaha penciptaan realitas yang dilakukan secara sadar dan melalui berbagai cara, bukan dipandang sebagai sesuatu yang secara natural, alami dan terlihat wajar.

Pendapat lain menyebutkan bahwa politik identitas merupakan politik tentang produksi identitas-identitas, penciptaan-penciptaan subjek beserta tindakan dan nilai yang dipandang baik dan seharusnya dijalani subjek tersebut sebagai sebuah kehidupan yang tidak bisa dipertanyakan (*ibid.*, hlm: 3). Produksi identitas dengan persepsi subjektif yang

dibawanya menjadi sebuah legitimasi yang dibentuk sebagai upaya menempatkan sebuah identitas tertentu secara mutlak dalam masyarakat.

Berbicara mengenai politik identitas tidak mengesampingkan perannya dalam hubungannya dengan kebudayaan, politik identitas sendiri merupakan bagian dari budaya massa, erat kaitannya dengan revolusi kebudayaan yang terjadi pada era postmodern (Heller dalam Abdilah, 2002 : 139). Terdapat sedikit kerancuan ketika menghubungkan politik identitas dengan kebudayaan, akan tetapi politik sebagai budaya massa memberikan sebuah ruang terhadap perbedaan-perbedaan yang dicapai melalui kebebasan yang ditawarkan.

Kebudayaan sendiri memiliki akar pada pluralisme dan kehidupan yang multikultural, perbedaan yang mendasari adanya politik identitas telah memperkuat adanya sebuah proses identifikasi yang tak terelakkan dalam masyarakat. Multikulturalisme menjadi bentuk penerimaan dan legitimasi atas citra orang yang timbul dari pengalaman-pengalaman yang berbeda, disinilah berbagai ketidaksamaan menampilkan diri. Multikulturalisme merupakan klaim pengakuan yang kemudian menerima eksistensi perbedaan (Abdilah, 2002: 149).

Disisi lain pluralitas menciptakan peluang bagi tumbuhnya politik identitas, perjuangan kelompok subkultur seperti gay, lesbian, feminis menyebar luas dalam ruang-ruang yang sebelumnya penuh dengan keterbatasan. Pengaruh kelompok-kelompok ini setidaknya sangat signifikan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang

menyangkut kepentingan publik atau massa. Sebagai contoh komunitas subkultur seperti gay, lesbian, dsb. seringkali dimanfaatkan oleh gerakan oposisi karena kepentingan kelompok tersebut.

Sejalan dengan multikulturalisme dan pluralisme yang mempengaruhi politik identitas membawanya dalam sebuah kerangka pandang yang berakar pada liberalisme, suatu paham yang berkaitan dengan kebebasan manusia sebagai sebuah hak yang paling mendasar. Perbedaan diawali dengan perasaan individu yang ingin lepas dari keterbatasan atau dominasi dalam kaitannya secara etnis, kelas, ras, dll.

Ide tentang kebebasan banyak dikemukakan oleh J.S. Mill (dalam Abdilah, 2004: 151) yang mengenalkan kebebasan berekspresi, khususnya pandangan-pandangan yang tidak populer, dan mempertahankan kebebasan individu untuk terlibat dalam sikap yang tidak membahayakan orang lain. Kebebasan juga diartikan untuk menolak pandangan umum atau berbeda dengan orang kebanyakan baik dalam berpendapat, beropini dalam konteks sosial, politik bahkan gaya hidup.

Masyarakat menjadi wujud berlakunya prinsip kebebasan baik secara personal maupun kelompok. Setiap individu maupun kelompok masing-masing mengikuti gaya hidup yang berbeda mengenai konsep hidup yang berguna bagi kebaikan secara normal. Mereka dapat hidup secara terbuka satu sama lain dengan saling menghormati dengan berinteraksi dengan bebas, namun ada juga yang hidup dalam dominasi

kelompok lain sehingga terbatas kebebasan berekspresi serta ruang gerak dalam melakukan sesuatu.

Politik identitas menjadi ruang pergulatan dominasi dalam ranah sosial, ideologi dan budaya melalui hegemoni atau penerapan nilai-nilai kelompok dominan secara sepihak. Berbagai hubungan yang terjadi menempatkan politik identitas lebih bersifat sebagai politik kebudayaan. Hal ini dikarenakan banyaknya persaingan dalam arena kebudayaan-kebudayaan yang terjadi didalamnya. Perjuangan politik identitas dimaknai dengan upaya mengeksistensi diri dalam kebudayaan melalui persaingan yang terjadi sesuai dengan konteks kepentingan kelompok yang diperjuangkan.

4. Homoseksual sebagai Kelompok Minoritas

Sering kita dengar adanya penggunaan istilah minoritas pada kesempatan tertentu. Minoritas dapat dipahami secara sederhana sebagai golongan yang memainkan peranan kecil dalam masyarakat, dalam kajian sosiologi adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran sebagai berikut :

“Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. Kedua anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas. Ketiga biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar” (Giddens dalam Terre pada <http://www.interseksi.org/.html> diakses 13 Agustus 2009).

Pada dasarnya munculnya golongan minoritas tidak lepas dari wujud dominasi dalam pergulatan peran yang ditampilkan dalam masyarakat. Kelompok yang didominasi seringkali menghadapi situasi yang tidak menguntungkan sama sekali bagi kepentingan mereka, sehingga pada kebanyakan contoh dari kelompok minoritas membentuk sebuah komunitas berdasarkan identitas seperti, ras, etnis, gender, keagamaan bahkan termasuk orientasi seksual seperti gay, lesbian dan transgender karena persamaan tujuan dengan harapan membentuk kesatuan yang terorganisir untuk bertahan pada nilai-nilai yang berlaku. “Identitas kelompok membantu seseorang memiliki perasaan lebih terjamin atas dirinya dan lingkungan sosial.” (Gutmann, 2003:2). Lebih dari itu identitas kelompok mendorong kelompok minoritas yang dimarjinalkan untuk melawan stereotype negatif yang telah lama diwariskan, mempertahankan pencitraan diri yang positif, dan membangun rasa hormat untuk anggota dalam kelompok tersebut.

Memahami eksistensi kelompok minoritas tidak lepas dari beberapa klasifikasi yang diberikan.

Kelompok minoritas dibagi menjadi tiga, yakni disamping [1] “gerakan-gerakan sosial baru” (gerakan kaum homoseksual, kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminisme), tercakup juga [2] “minoritas-minoritas nasional” (kelompok-kelompok masyarakat yang potensial dapat memerintah sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam sebuah negara yang lebih luas, misalnya orang Puerto Rico dan Navaho di Amerika Serikat, orang Basque di Spanyol, penduduk berbahasa Prancis di Quebec, Kanada, dan lain-lain). [3] “kelompok-kelompok etnis” (para imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya untuk masuk ke komunitas masyarakat lain seperti orang Asia, Afrika, Yahudi, Islam dan seterusnya di Amerika Serikat) (Hardiman dalam Kymlicka, 2003: xii).

Kelompok minoritas telah menjadi perhatian masyarakat dunia sejak meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia serta demokrasi. Kelompok minoritas yang dikategorikan dalam unsur pergerakan, etnis serta bangsa telah menemukan ruang yang lebih luas dalam memperjuangkan persamaan hak serta kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan kaidah-kaidah kebebasan dan kemanusiaan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah banyak memutuskan beberapa resolusi yang menjamin kebebasan kelompok minoritas untuk memenuhi hak-hak atas kesetaraan.

Dalam negara-negara yang mana minoritas etnis, agama, dan bahasa ada, orang yang memiliki identitas-identitas minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya, dalam komunitas dengan anggota lainnya dari kelompok yang lain, untuk menikmati kebudayaan milik mereka, untuk menyatakan dan menjalankan agamanya, atau untuk menggunakan bahasa mereka. (dalam Abdilah, 2001 : 190).

Jaminan perlindungan juga menyangkut kebebasan berekspresi bagi identitas dalam suatu Negara.

Negara harus membuat ukuran-ukuran untuk menciptakan kondisi-kondisi menyenangkan dan memungkinkan orang yang memiliki identitas minoritas untuk mengekspresikan karakteristik mereka dan mengembangkan kebudayaan, bahasa, agama, adat istiadat dan kebiasaan mereka, kecuali dimana praktik-praktik yang mengarah pada pemerkosaan hukum Negara dan penolakan terhadap standar-standar internasional. (*ibid.*, hlm. 191).

Kelompok minoritas dengan latar belakang beragam telah dapat menentukan arah mereka sendiri karena banyak didukung oleh berbagai kesepakatan bersama atas dasar persamaan yang membangun satu sama lain. Hanya saja pengaruh kuat dominasi baik secara ideologis maupun

politis dalam struktur masyarakat telah menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan kelompok minoritas.

Homoseksual sebagai salah satu bagian dari kelompok minoritas sejak lama telah diakui keberadaannya, namun baru akhir tahun 1970-an studi keilmuan mengenai homoseksual mencuat ke permukaan setelah adanya upaya progresif yang sebelumnya secara vokal disuarakan baik oleh kaum homoseksual sendiri maupun para akademisi yang tertarik pada trend budaya populer yang menyertai momentum pergerakan pembebasan kaum homoseksual. Kemapanan kajian studi gay dan lesbian juga ditandai dengan kelahiran jurnal-jurnal ilmiah bidang ini. *Journal of Homosexuality* pertama kali dipublikasikan pada tahun 1974 dan mengupas berbagai isu seperti remaja-remaja gay, orang-orang tua gay, dan lain-lain. (Juliastuti dalam www.kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm diakses 7 agustus 2009) .

Berbicara mengenai homoseksual tidak lepas dari sejarah panjang yang menyertainya. Mulai dari masyarakat Yunani kuno hingga masyarakat barat sekarang pergulatan mengenai homoseks masih dianggap ideal dan dilembagakan. Para prajurit laki-laki pada masa Yunani kuno diharapkan oleh masyarakat untuk memiliki seorang sahabat lelaki yang lebih muda, yang dicintainya dan kawan setianya dalam berlatih, berolahraga, berlomba, dan bercinta. Selain itu terdapat bukti kuat yang lain bahwa Iskandar yang agung sang penakluk dari Makedonia yang bahkan disebut dalam satu dari beberapa kisah dalam

kitab suci juga memiliki hubungan emosional-seksual dengan sahabat maupun budak laki-lakinya.

Homoseksualitas menurut Oetomo dapat didefinisikan sebagai “orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang atau orang dengan jenis kelamin yang sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dengan jenis kelamin yang sama” (Oetomo, 2003: 6). Pengertian ini didasari oleh definisi seseorang yang memiliki preferensi (pilihan) teman seksnya lebih kepada sesama jenis daripada heteroseksual. Selama ini kaum homoseksual banyak menghadapi prasangka buruk dari pilihan orientasi seks mereka itu, akan tetapi selebihnya kaum homoseksual adalah orang yang memiliki kemampuan secara fisik maupun ketrampilan yang sama dengan orang lain. Kecenderungan pada pelabelan yang negatif ini membuat kaum homoseksual seolah-olah menjadi kaum yang “salah” sehingga perannya dalam masyarakat tidak diakui secara formal karena orientasi yang dianggap “tidak normal” seperti orang lain.

Terdapat dua pendapat yang mengemuka mengenai homoseksualitas baik dalam pandangan psikologis maupun sosial. Pandangan yang pertama berasal dari para essentialist yang memandang homoseksualitas sebagai bagian yang hakiki (esensial) dari struktur kepribadian manusia yang merupakan suatu bawaan dari lahir (innate) (*Ibid.*, hlm: 28). Homoseksual dalam pandangan tersebut merupakan akibat dari faktor genetika yang dibawa sejak dilahirkan, sehingga garis

hidup seorang homoseks dapat dikatakan sebagai “pemberian” oleh Tuhan. Pandangan homoseksual secara esensial menjadi argument utama bagi kaum homoseksual untuk mendefinisikan posisinya di dalam masyarakat. Di sisi lain pandangan yang kedua melihat kategori homoseks sebagai konstruksi sosial. Sarwono (dalam <http://sarlito.hyperphp.com> diakses tanggal 11 November 2009) mendeskripsikan homoseksual menjadi tiga jenis, yaitu homoseks sosial (ikut-ikutan teman, atau melacurkan diri sebagai homoseks), homoseks kultural (misalnya : warok Ponorogo), dan homoseks psikologis (patah hati, dll). Ketiga jenis homoseksual tersebut dalam pandangan medis masih dapat diperbaiki oleh psikolog dengan melakukan beberapa terapi kejiwaan.

Kaum homoseksual menyadari bahwa pengaruh dominan masyarakat heteroseksual telah menempatkan mereka dalam sebuah lingkungan eksklusif yang menjadi tempat khusus untuk menunjukkan identitas mereka. Lingkungan yang tertutup dari dunia luar membawa mereka menjadi objek pada stigma-stigma masyarakat “normal” dimana secara sepihak terus melemahkan legitimasi kaum homoseksual sebagai warga negara (*citizens*).

Lingkungan yang tertutup dan terbatas bagi kaum homoseksual menyebabkan terdapat beberapa istilah yang sangat populer dalam proses interaksi kaum homoseksual pada posisinya di masyarakat, yaitu *coming out* (keluar) dan *closet* (kloset).

Term 'kloset' digunakan sebagai metafor untuk menyatakan ruang privat atau ruang subkultur dimana seseorang dapat mendiaminya secara jujur, lengkap dengan keseluruhan identitasnya yang utuh. Sedangkan term '*coming out*' digunakan untuk menyatakan ekspresi dramatis dari 'kedatangan' yang bersifat privat atau publik. Pemakaian term '*closet*' dan '*coming out*' disini bermakna sangat politis (Juliastuti dalam www.kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm diakses 7 agustus 2009).

Kemudian muncul narasi "*coming out of the closet*" di kalangan kaum homoseksual yang menunjukkan sebuah pemisahan antara individu-individu didalam dan diluar "kloset". kategori di dalam "kloset" diartikan sebagai individu yang menjalani kehidupannya dengan penuh kepalsuan, dan karena itu mereka tidak bahagia disebabkan oleh tekanan masyarakat atas posisi sosialnya, sedangkan individu yang menginginkan untuk keluar dari "kloset" berusaha untuk lepas dari kepalsuan tersebut dan memaknainya dengan membentuk strategi akomodasi dan pertahanan yang diproduksi untuk menghadapi norma-norma masyarakat heteroseksual.

Terdapat sebuah pengorganisasian kaum homoseksual yang berusaha keluar dari "kloset" dengan membentuk sebuah kelompok identitas yang berupaya melindungi kepentingan maupun gaya hidup homoseksual. Munculnya kelompok resistensi kaum homoseksual menciptakan sebuah gesekan yang sangat mungkin menimbulkan konflik, hal ini dimulai oleh kaum homoseksual dengan melakukan apa yang dinamakan dengan "*closet practice*" yaitu sebuah respon terhadap strategi represif yang diterapkan oleh masyarakat heteroseksual untuk mengeluarkan kaum homoseksual dari kehidupan masyarakat. Strategi

ini dimulai pada tahun 1940-an dan mulai diintensifkan pada tahun 1950 hingga 1960-an.

Di Amerika Serikat pun, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncul penerbitan dan gerakan gay dan lesbian; antara lain yang paling menonjol adalah masyarakat Mattachine, yang eksis secara sembunyi-sembunyi pada awalnya, namun setelah mengeluarkan penerbitan menjadi per definisi terbuka. Juga ada pada masa tahun 1950-an itu One, inc., dan Daughters of Bilitis yang khusus wanita (Oetomo, 2003: 11).

Homoseksual mengalami berbagai pasang-surut pergerakan yang memperjuangkan hak mereka. Kondisi ini dimulai dengan munculnya *Gay Liberation Movement*, yang merupakan sebuah pergerakan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender pada akhir tahun 60-an hingga pertengahan tahun 70-an di wilayah Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, dan Selandia Baru. Pergerakan kaum homoseksual secara radikal secara lebih spesifik terjadi di Amerika Utara pada tahun 1969 dengan pecahnya perlawanan kaum homoseksual pada peristiwa Stonewall yang menandai bermulanya upaya progresif kaum homoseksual dalam memperjuangkan persamaan hak dan kebebasan bermasyarakat bagi komunitas mereka. Terlebih homoseksual di Amerika telah mendapat sedikit angin segar dengan dicabutnya homoseksualitas dari daftar penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa oleh Himpunan Psikiatri Amerika (*American Psychiatric Association, APA*) pada tahun 1974. Keputusan tersebut juga berdasarkan penelitian Dr. Alfred Kinsey mengenai perilaku seks pada laki-laki dan perempuan pada tahun 1940-an.

37% dari laki-laki Amerika pernah mengalami beberapa kali perbuatan homoseks overt dan bahwa 10% dari laki-laki Amerika adalah kurang lebih homoseks eksklusif. Angka kedua itulah yang kemudian digunakan oleh pergerakan kaum gay dan lesbian untuk mengklaim jumlah orang yang secara potensial diwakilinya, yaitu 10% dari populasi manusia (*ibid.*, hlm: 13).

Kinsey kemudian secara lebih lanjut membuat sebuah klasifikasi melalui skala yang merupakan sinambungan (*kontinum*) antara heteroseksualitas ekstrem yang dilambangkan dengan (0) dan homoseksual ekstrem dengan lambang (6).

Pergerakan kaum homoseksual di Amerika identik dengan dengan kota San Francisco. Kota tersebut dapat diibaratkan sebagai kiblat maupun simbol atas kehidupan yang dimimpikan oleh kaum homoseksual di seluruh penjuru dunia karena di kota tersebut kaum homoseksual dapat membaaur dan bersosialisasi tanpa menyembunyikan identitas mereka. Perkembangan kaum gay di San Francisco meningkat sejak kedatangan prajurit Amerika yang kembali dari Perang Dunia II, ribuan dari prajurit tersebut dikeluarkan akibat orientasi seksualnya yang sesama jenis. Kebanyakan diantara mereka kemudian menetap di distrik kecil di San Francisco bersama dengan identitas yang telah lama mereka sembunyikan selama perang berlangsung.

Pengorganisasian baik secara sosial, kultural maupun politik pada komunitas gay menempatkannya pada kedudukan yang lebih tinggi sejak terpilihnya Harvey Milk sebagai *City Supervisor* setelah memulai perjuangan dari pintu ke pintu pada awal tahun 1970. Milk muncul menjadi ikon kaum homoseksual yang secara signifikan merubah

pandangan masyarakat Amerika yang dilanda ketakutan terhadap kaum homoseksual. Komunitas homoseksual di Amerika berusaha memperluas rencana dan kerangka pandang baru dengan meletakkan inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Di bawah pemerintahan presiden Reagan banyak pemikiran-pemikiran konservatif yang diadopsi oleh pergerakan politik kaum homoseksual sehingga menempatkannya pada salah satu kelompok penting yang banyak memiliki agenda yang progresif.

Salah satunya ketika krisis AIDS menghantam Amerika pada awal tahun 80-an, dengan ribuan orang yang tewas Karena oleh virus tersebut, arah pergerakan politik kaum homoseksual sangat fokus pada sumber penelitian yang hasilnya mereka dedikasikan pada situasi darurat tersebut. Lebih dari itu komunitas homoseksual di Amerika juga menciptakan jaringan-jaringan untuk mempertahankan organisasi mereka dari stigma yang dialamatkan kepada kaum homoseksual akibat kejadian tersebut.

Kaum homoseksual terus berupaya memposisikan kembali kedudukannya didalam masyarakat. Melalui identitas sosial dan politik yang mereka miliki, kaum homoseksual mencoba bertahan dan mengakhiri semua diskriminasi melalui cara-cara yang terorganisir dalam sebuah kesatuan integral melalui jaringan-jaringan yang mereka buat untuk memperkuat komunitasnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan semiotika yang merupakan salah satu bentuk analisis kualitatif interpretif yang membahas tentang tanda (*sign*) dan semua yang berhubungan dengannya. Semiotik digunakan untuk menganalisis teks media dengan asumsi bahwa teks media dikomunikasikan dengan menggunakan seperangkat tanda. “Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indera kita, tanda mengacu pada sesuatu diluar tanda itu sendiri, dan bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda” (Fiske,1990:61).

Roland Barthes mengembangkan pendekatan analisis semiotik melalui apa yang disebut dengan mitos. Mitos bukanlah mitologi yang sering dan lazim di dengar dalam cerita tradisional, namun “Mitos merupakan cara berpikir dari sesuatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu” (*ibid.*, hlm: 12).

Mitos seperti yang akan terlihat dalam kajian teks semiotika bukanlah sebuah bahasa yang tak berdosa, netral, melainkan menjadi penanda untuk memainkan pesan-pesan tertentu yang boleh jadi berbeda sama sekali dengan makna aslinya. Produksi mitos dalam teks membantu dalam mendeskripsikan situasi sosial budaya dan mungkin termasuk juga situasi politik yang sedang berlangsung. Mitos memiliki dimensi

tambahan yang disebut dengan naturalisasi, melalui naturalisasi sistem makna menjadi masuk akal dan diterima apa adanya pada suatu masa.

2. Objek penelitian

Penelitian ini memilih objek kajian film feature “Milk” yang diproduksi oleh Focus Features yang disutradarai oleh Gus Van Sant. Film ini merupakan film yang mendapatkan atensi yang besar sehingga banyak juga mendapatkan penghargaan internasional seperti London Film Critics Circle 2009, Golden Globe Award 2009, Palm Springs International Film Festival 2009, dan termasuk kategori film terbaik Academy Award tahun 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Peneliti juga akan melakukan studi literatur/kepustakaan sebagai landasan dalam memperkuat analisis permasalahan dalam penelitian ini. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal ilmiah, maupun sumber lainnya yang memuat informasi yang mendukung penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan identifikasi pada film “Milk” dan kemudian akan ditampilkan dalam bentuk *layout*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotik signifikasi dua tahap Roland Barthes dengan konsep mitos yang telah dikembangkannya. Barthes melanjutkan apa yang sebelumnya telah ditemukan oleh Saussure tentang bahasa dan makna atau antara penanda dan petanda. Roland Barthes menyusun sebuah model sistemik yang menganalisis tanda lebih jauh dengan menyusun model sistematis untuk menganalisis negosiasi dan gagasan makna, inti teorinya adalah gagasan tentang dua tatanan pertandaan (*order of significations*) (Fiske, 1990: 118). Tahap pertama penandaan telah dibahas oleh Saussure tentang hubungan penanda dan petanda. Petanda adalah kesan indrawi suatu tanda sedangkan petanda merupakan konsep yang dimunculkan oleh suatu tanda. Relasi antara penanda dan petanda, cara kesan indrawi 'menunjuk pada' atau memunculkan suatu konsep yang disebut dengan sistem pertandaan (*signification*). Pada analisis yang dikembangkan oleh Barthes, tatanan pertama yang memunculkan hubungan pertandaan antara penanda dengan petanda disebut dengan denotasi. "Denotasi adalah sesuatu yang sering dipikirkan sebagai 'makna harfiah tanda', sistem pertandaan tingkatan pertama yang benar dan gamblang yang hadir sebelum dan independen dari tambahan berikutnya yang sekunder seperti konotasi" (Thwaites, dkk., 2009:94).

Konotasi muncul sebagai pertandaan tahap kedua Barthes dalam analisisnya. Konotasi merupakan asosiasi tambahan yang muncul sebagai pemberi label pada tanda untuk mengkomunikasikan fakta, selain itu “Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya” (Fiske, 1990:118). Konotasi bisa bersifat plural, tetapi tidak berarti bahwa konotasi merupakan perkara preferensi subjektif individual. Seperti semua makna, konotasi muncul melalui kode yang pada dasarnya dimiliki bersama dan bersifat sosial (Thwaites, 2009:90). Terbukanya wilayah konotatif ini membantu pembaca teks dapat memahami penggunaan gaya bahasa kiasan dan metafora yang tidak mungkin dilakukan pada tingkatan denotatif.

Hubungan antara denotasi dengan konotasi mulai terlihat menjadi dua bagian yang berbeda namun saling mempengaruhi, hal tersebut dapat dianalogikan dengan menempatkan denotasi sebagai aspek mental dari sebuah tanda mengacu pada apa yang disebut Fiske (1990: 119) sebagai :

Produksi mekanis di atas film tentang obyek yang ditangkap kamera. Konotasi adalah bagian manusiawi dari proses ini, dimana mencakup seleksi atas apa yang masuk ke dalam *frame*, rana sudut pandang, mutu film dan seterusnya. Denotasi adalah *apa* yang di foto, sedangkan konotasi adalah *bagaimana* memfotonya.

Melihat sebuah film, berita, maupun lukisan akan meninggalkan kesan yang jelas bahwa terdapat tanda linguistik, visual, dan jenis tanda lain yang direpresentasikan didalamnya. Mendenotasikan hal tersebut tidaklah sederhana akan tetapi menciptakan tingkat konotasi yang

dilampirkan pada tanda. Barthes menyebut fenomena ini sebagai penciptaan mitos. Pemikiran Barthes mengenai mitos melanjutkan apa yang diandaikan Saussure tentang hubungan bahasa dan makna atau antara tanda dan petanda.

Mitos berada dalam tahap kedua dalam proses penandaan Barthes, konotasi mendenotasikan suatu hal yang dinyatakan dalam mitos dan mitos memiliki konotasi terhadap ideologi tertentu *“myth serves the ideological interest of a particular group in society”* (Bignell, 1997:25) hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Van Zoest yang mengatakan mitos adalah suatu ceritera yang didalamnya sebuah ideologi berwujud (Van Zoest, 1991: 106). Ideologi sendiri adalah sistem kepercayaan atau sebuah kesadaran semu yang mempengaruhi cara pandang seseorang mengenai suatu hal. Beroperasinya ideologi melalui mitos ini terjadi melalui bahasa asosiasi yang melekat pada aspek konotatif analisis semiotik, ideologi dalam teks ditemukan dengan jalan meneliti konotasi-konotasi yang terdapat didalamnya (Van Zoest dalam Sobur, 2006: 129).

Tabel 1.1
Sistem Signifikasi Dua Tahap Roland Barthes

	1. Penanda	2. Petanda
Penanda primer Denotasi	3. Tanda	
Penanda sekunder Konotasi	I. PENANDA	II. PETANDA
	III. TANDA	

Sumber : (Storey, 2007: 110)

Film merupakan media *audio visual* yang didalamnya terdapat unsur penandaan yang saling berhubungan untuk mewakili suatu pemaknaan tertentu. Tanda-tanda yang ingin disampaikan seringkali terlihat didalam musik, dialog, maupun teknik pengambilan gambar. Berger dalam kajiannya menawarkan sebuah teknik analisis media massa (dalam hal ini adalah televisi) dengan melihat pengambilan gambar dari sudut pandang (*angle*) kamera. Berger menyadari ada alasan tersendiri dalam menentukan penyuntingan gambar untuk mewakili gagasan tertentu yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Pengambilan Gambar

Penanda (pengambilan gambar)	Definisi	Petanda (makna)
<i>Close up</i>	Hanya wajah	Keintiman
<i>Medium shot</i>	Hampir seluruh tubuh	Hubungan personal
<i>Long shot</i>	Setting dan kamera	Konteks, skope, jarak publik
<i>Full shot</i>	Seluruh tubuh	Hubungan sosial

sumber: (Berger, 2000: 33).

Terlebih terdapat beberapa teknik penyuntingan gambar yang juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk kode teknis, diantaranya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kerja Kamera dan teknik Penyuntingan

Penanda	Definisi	Petanda
<i>Pan down</i>	Kamera mengarah ke bawah	Kekuasaan, kewenangan
<i>Pan up</i>	Kamera mengarah ke atas	Kelemahan, pengecilan
<i>Dolly in</i>	Kamera bergerak kedalam	Observasi, fokus
<i>Fade in</i>	Gambar kelihatan pada layar kosong	Permulaan
<i>Fade out</i>	Gambar di layar menjadi hilang	Penutupan
<i>Cut</i>	Pindah dari gambar satu ke gambar lain	Kebersambungan, menarik
<i>wipe</i>	Gambar terhapus dari layar	“penentuan” kesimpulan

sumber: (Berger, 2000: 34).

Melihat teknis analisis yang dilakukan, maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan secara konstruksionis yaitu dengan melihat penggunaan bahasa atau kode-kode lisan dan visual, kode teknis, kode pakaian dan sebagainya dengan mengambil bagian-bagian tertentu dari *scene* maupun *shot* yang merepresentasikan politik identitas.